

**ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN,
ENVIRONMENTAL SENSITIVITY, *FINANCIAL DISTRESS*,
DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGUNGKAPAN
SUKARELA PERUSAHAAN KELUARGA YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

Serly*

*Program Studi Akuntansi, Universitas Internasional Batam
Email: serly@uib.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the effect of good corporate governance, environmental sensitivity, financial distress, and earnings management on voluntary disclosure in family firms listed on the Indonesian Stock Exchange. Voluntary disclosure is measured by good corporate governance (board activity, board size, non-executive directors, foreign ownership, government ownership, institutional ownership, managerial ownership, and number of shareholders), environmental sensitivity, financial distress, and earnings management as independent variable. Industry type and firm size as control variable. The data used in this study are the annual reports of non-financial companies listed on the Indonesian Stock Exchange. The target population consists of 139 firms or 695 firm-year observations of companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2011-2015. The data obtained were tested with panel regression. The results show that board size, number of shareholders, environmental sensitivity, and firm size have positive significant impact on voluntary disclosure. Institutional ownership and financial distress have negative significant impact on voluntary disclosure. In contrast, this research found that board activity, non-executive directors, foreign ownership, government ownership, managerial ownership, earnings management, and leverage have no significant effect on voluntary disclosure.

Keywords: *Family Firm, Corporate Governance, Environmental Sensitivity, Financial Distress, Earnings Management, Voluntary Disclosure*

PENDAHULUAN

Menurut *International Finance Corporation World Bank Group* (2011), bisnis keluarga mewakili lebih dari 70% keseluruhan bisnis serta memainkan peran penting dalam perekonomian dan tenaga kerja. Berdasarkan penelitian sistematis dan kuantitatif yang dilakukan oleh SWA tahun 2011 dengan menggunakan data primer dari 3.568 bisnis keluarga yang terdaftar di bursa 10 negara Asia. Secara keseluruhan dari 10 negara Asia, diperoleh data bahwa bisnis keluarga menempati posisi sekitar 50% dari seluruh perusahaan yang terdaftar dan 32% dari total sumber modal pasar.

Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan menduduki peringkat 18 sedunia dalam hal

perekonomian. Selain itu, Indonesia adalah salah satu pasar modal di Asia yang terus menarik investasi global dari berbagai negara (Darmadi & Sodikin, 2013).

Sebagian besar perusahaan di Indonesia merupakan perusahaan yang dimiliki oleh keluarga atau perorangan (Singapurwoko, 2013). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Price Waterhouse Cooper* (PwC) pada tahun 2014 mengenai perusahaan keluarga di Indonesia, diketahui bahwa Indonesia memiliki lebih dari 95% perusahaan keluarga. Dengan jumlah perusahaan keluarga yang mendominasi, diperoleh data bahwa perusahaan keluarga tersebut menguasai sekitar 25% produk domestik bruto (PDB) di Indonesia. Hal ini senada dengan pernyataan Claessens et al.

(2000) yang menyatakan bahwa perusahaan Indonesia memiliki tingkat konsentrasi kepemilikan dan kontrol keluarga yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Timur lainnya.

Ağca dan Önder (2007) menyatakan bahwa transparansi dan keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar dalam tata kelola perusahaan. Pengungkapan informasi secara transparan menunjukkan perusahaan memiliki tingkat efisiensi yang baik. Agar pengambilan keputusan ekonomi dapat dilakukan secara tepat, pengungkapan informasi diharapkan mampu menjadi acuan bagi seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas. Sebagai sarana transparansi dan keterbukaan informasi serta pencapaian efisiensi, pengungkapan laporan keuangan sebagai faktor yang dianggap signifikan

Perusahaan berusaha untuk menampilkan kondisi dimana perusahaan merupakan sebuah usaha yang memiliki *good value* dan *good investment* bagi para investor dalam menanamkan modal mereka. Untuk memperoleh kepercayaan *investor* dan mempertahankan asumsi *going concern*, maka informasi yang diberikan harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap operasi unit usaha tersebut (Chariri & Ghozali, 2013). Sehingga peningkatan pengungkapan informasi dianggap penting bagi perusahaan dalam menerapkan praktek keberlangsungan usaha (*sustainable business*) dalam memasuki pasar modal internasional (Ling & Lee, 2012).

Peraturan mengenai pengungkapan informasi wajib oleh perusahaan publik di Indonesia diatur melalui Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) pada peraturan KEP-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berbasis *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Secara konseptual, pengungkapan merupakan penyediaan informasi dalam laporan keuangan, meliputi laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan,

dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan (Suwardjono, 2005).

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan terbagi menjadi dua, yakni pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang berisikan informasi tambahan tentang perusahaan, yang bersifat sukarela/pilihan manajemen perusahaan yang dipandang relevan untuk kepentingan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Informasi sukarela yang diungkapkan oleh perusahaan tidak dibatasi oleh persyaratan hukum tertentu (Botosan, 1997).

Dalam pengungkapan sukarela, perusahaan akan mengungkapkan *good news* dan *bad news* (Yuniasih et al., 2013). Ketika perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih banyak untuk menarik para investor, tetapi ketika perusahaan sedang mengalami kondisi *financial distress*, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang terbatas (Gantjowati & Nugraheni, 2014).

Teori keagenan memberikan penjelasan mengenai pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan dan hubungan antara pemilik dan pengelola perusahaan yang menghasilkan publikasi atas laporan tahunan perusahaan.

Pengelolaan informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan dapat menimbulkan adanya masalah asimetri informasi dan hilang fungsinya karena manajer dapat mengendalikan informasi yang akan dipublikasikan. Attig et al. (2011) berpendapat bahwa pengungkapan yang kurang akan menambah buruk informasi asimetris yang terjadi. Informasi asimetris akan menguntungkan pemegang saham pengendali dalam membuat keputusan ekonomi yang menguntungkan pihak pengendali tetapi merugikan pemegang saham minoritas.

Kondisi terjadinya informasi asimetris yang tinggi membuat pemegang saham tidak memiliki sumber daya yang

cukup serta akses data yang relevan dalam memonitor pihak manajemen. Hal ini memungkinkan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba dengan memanfaatkan fleksibilitas dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diperbolehkan oleh standar akuntansi untuk menghasilkan jumlah laba yang diinginkan.

Tata kelola perusahaan yang kuat mendukung pengungkapan informasi untuk lebih transparan (Chen & Jaggi, 2000). Penerapan tata kelola perusahaan merupakan salah satu alat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengungkapkan informasi keuangan (Poluan & Nugroho, 2015). Dalam meningkatkan transparansi dalam perusahaan, peningkatan pada sistem manajemen risiko perusahaan menjadi salah satu cara terbaik bagi perusahaan dalam meningkatkan reputasi dan penanganan eksplosur risiko (*risk exposure*). Lambert et al. (2007) mengungkapkan bahwa pengungkapan sukarela sebagai faktor yang berkontribusi dalam membantu perusahaan mengurangi informasi asimetri.

Chakroun (2013) berpendapat bahwa semakin besarnya kepemilikan saham oleh anggota keluarga, memberikan hak kontrol yang kuat melalui kehadiran salah satu anggota di jajaran direksi. Hal ini dapat menyiratkan bahwa kemungkinan tingkat pengungkapan sukarela yang rendah dapat terjadi pada perusahaan keluarga dan tingkat profesionalisme dalam pengambilan keputusan cenderung didasari oleh faktor kepentingan pribadi.

Darmadi dan Sodikin (2013) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki tingkat pengawasan yang rendah sehingga diperkirakan tingkat pengungkapan pada laporan tahunan cenderung rendah pada perusahaan keluarga. Hal ini terjadi dikarenakan pada perusahaan keluarga, pemegang saham dan manajemen adalah anggota keluarga pendiri perusahaan.

Perusahaan keluarga sering bertindak atas dasar emosi, melibatkan semua anggota keluarga dan untuk melindungi diri mereka sendiri, dan di sisi lain perusahaan harus

beroperasi dengan tujuan memaksimalkan kekayaan pemegang. Dengan struktur kepemilikan unik yang dimiliki oleh perusahaan keluarga, perusahaan memiliki pandangan tentang pengungkapan informasi yang berbeda dengan perusahaan lain. Sehingga memungkinkan informasi yang disajikan kepada pihak luar lebih rendah.

Tata kelola perusahaan bertindak sebagai untuk melindungi pemegang saham dari pengambilalihan oleh manajer (Caliskan, 2012). Ini menguntungkan para pemegang saham melalui peningkatan keterbukaan informasi, nilai perusahaan yang lebih tinggi dan informasi asimetris yang lebih rendah sehingga meningkatkan pengungkapan perusahaan.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengungkapan Wajib dan Sukarela

Ghasempour dan Yusof (2014) mendefinisikan pengungkapan sebagai pentransferan dan penyajian informasi ekonomi yang berhubungan dengan status keuangan dan kinerja perusahaan, baik keuangan maupun bukan keuangan, kuantitatif atau dalam bentuk lain. Jika pengungkapan perusahaan dikarenakan persyaratan hukum, pengungkapan ini disebut sebagai pengungkapan wajib, dan bila tidak diwajibkan oleh peraturan tertentu, maka dianggap sebagai pengungkapan sukarela.

Perusahaan dapat memberikan pengungkapan melalui laporan tahunan. Terdapat dua jenis pengungkapan yaitu pengungkapan wajib dan sukarela. Pengungkapan wajib secara khusus berfokus pada penyajian laporan keuangan dan kelengkapan catatan kaki yang diwajibkan sesuai dengan peraturan dan undang-undang, sedangkan pengungkapan sukarela mengizinkan manajemen bebas dalam menentukan informasi yang akan diungkapkan (Uyar et al., 2013).

Terdapat dua metode untuk mengukur indeks pengungkapan sukarela, yaitu:

- a. Metode *weighted disclosure index*, yaitu pemberian bobot berdasarkan

- subjektifitas ketika preferensi pengguna tidak mengetahui penetapan bobot untuk setiap item yang serupa.
- b. Metode *unweighted disclosure index*, yaitu semua pengungkapan informasi pada laporan keuangan tahunan diberikan nilai bobot yang sama. Pendekatan skor tertimbang mengasumsikan bahwa setiap item pengungkapan sama pentingnya bagi pengguna.

Pengungkapan Sukarela

Pengungkapan sukarela merupakan insentif yang dimiliki oleh manajemen dalam menyediakan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dianggap relevan bagi pengguna laporan tahunan perusahaan (Nasir & Abdullah, 2004).

Pada penelitian ini terdapat dua teori yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian mengenai pengungkapan sukarela yakni:

- a. Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan kontrak kerja antar pemilik perusahaan (*principle*) dan manager (*agent*), dimana satu orang atau lebih pemilik melakukan delegasi tugas kepada manager (*agent*) untuk melakukan pengambilan keputusan strategis berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Pengungkapan sukarela cenderung tidak berjalan sesuai fungsi awal disebabkan adanya asimetri informasi dari teori keagenan. Asimetri informasi terjadi karena manager memiliki informasi yang lebih mengenai kondisi aktual yang terjadi di perusahaan dibandingkan dengan informasi yang diketahui oleh *principle* dan memiliki kecenderungan untuk menyembunyikan informasi yang bersifat material dari *principle*.

- b. Teori Pemberian Isyarat (*Signalling Theory*). *Signalling theory* menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. *Signalling theory* menjelaskan bahwa manager akan melakukan pemberian sinyal untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi di antara berbagai pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan (Gantjowati & Nugraheni, 2014). *Signalling theory* menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar (publik), dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Terdapat dua jenis signal yang dapat diungkapkan oleh perusahaan yakni *good news* dan *bad news*.

Tata Kelola Perusahaan dan Pengungkapan Sukarela

Organization for Economic Corporation and Development (OECD) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai suatu struktur atau sistem untuk menetapkan tujuan yang diinginkan dicapai oleh perusahaan, saran untuk mencapai tujuan tersebut, dan untuk menentukan pengawasan atas kinerja perusahaan. Vali et al. (2010) menekankan bahwa tata kelola perusahaan merupakan faktor yang membantu perusahaan dalam mencapai kualitas kinerja perusahaan yang lebih baik. Tata kelola perusahaan akan meningkatkan kualitas informasi akuntansi bagi pemangku kepentingan melalui serangkaian peraturan dalam organisasi. Mekanisme tata kelola perusahaan mampu mengurangi konflik keagenan yang timbul di dalam perusahaan.

Terdapat lima prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang harus dimiliki dan diterapkan oleh perusahaan, dimana pedoman tersebut dikeluarkan oleh

pemerintah melalui Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Lima prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik terdiri atas akuntabilitas, independensi, transparansi, responsibilitas, dan keadilan. Sejalan dengan pedoman yang dikeluarkan oleh KNKG, melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 pada tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN diwajibkan menjadikan prinsip pada tata kelola perusahaan yang baik sebagai landasan operasional kegiatan usaha. Sehingga melalui pengungkapan sukarela, maka akan mewujudkan asas tata kelola yakni transparansi dan akuntabilitas (Poluan & Nugroho, 2015).

Financial Distress dan Pengungkapan Sukarela

Financial distress adalah suatu tahapan penurunan kondisi keuangan pada suatu perusahaan yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Kondisi keuangan perusahaan yang mengalami *financial distress* menurut teori pemberian sinyal (*signalling theory*) memiliki kecenderungan untuk mengurangi/meminimalkan dan membatasi suatu informasi yang akan disajikan kepada publik melalui laporan tahunan perusahaan. Dengan pembatasan informasi yang disajikan kepada publik oleh perusahaan yang mengalami kondisi keuangan menyebabkan informasi pengungkapan sukarela perusahaan pada laporan tahunan akan berkurang bila dibandingkan dengan perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat (Gantjowati & Nugraheni, 2014).

Environmental Sensitivity dan Pengungkapan Sukarela

Menurut Othman et al. (2014), terdapat beberapa jenis industri yang memberikan informasi secara spesifik mengenai perusahaan, yang mana informasi yang diberikan tersebut mungkin di nilai tidak perlu disajikan bagi perusahaan di

industri lainnya. Perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan, agribisnis, dan kimia dianggap akan mengungkapkan lebih banyak pengungkapan untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan dan menjaga nama baik untuk mempertahankan komsumen.

Manajemen Laba dan Pengungkapan Sukarela

Manajemen laba sebagai pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari standar akuntansi untuk memaksimalkan utilitas yang perusahaan miliki atau nilai pasar perusahaan. Menurut McNichols (2000), manajemen laba dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara yakni manajemen akrual, mengubah prosedur akuntansi perusahaan serta menata transaksi pendapatan dan laba. Semakin meningkatnya pengungkapan sukarela maka tingkat transparansi akan semakin meningkat. Sehingga dengan dengan meningkatnya transparansi, praktek manajemen laba akan lebih mudah untuk dideteksi oleh pemegang saham.

Perusahaan Keluarga

Price Waterhouse Cooper (PwC) mendefinisikan serta mengategorikan perusahaan keluarga atas 3 bagian besar, yakni:

1. Pemilik suara mayoritas berada di tangan pendiri atau pihak yang mengakuisisi perusahaan (pasangan, orang tua, anak, maupun ahli waris).
2. Minimal terdapat satu orang perwakilan keluarga yang terlibat secara langsung di dalam manajemen atau administrasi perusahaan.

Pada perusahaan publik, pendiri/orang yang melakukan akuisisi perusahaan (pihak keluarga) minimal memiliki saham sebesar 25% atas perusahaan dan ada satu orang anggota keluarga yang terlibat di dalam manajemen (*board*).

Perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga menunjukkan keterlibatan keluarga dalam hal kepemilikan saham, manajemen, dan suksesi antar generasi dalam anggota

keluarga. Apabila pihak keluarga memiliki saham kepemilikan ataupun hak pengendali minimal 20% dari total saham perusahaan maka perusahaan tersebut merupakan perusahaan keluarga (Darmadi & Sodikin, 2013).

Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen **Variabel Jumlah Rapat Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Sukarela**

Domínguez dan Gámez (2014) mengungkapkan bahwa jumlah rapat dewan direksi adalah total rapat yang dilakukan oleh dewan direksi dalam suatu perusahaan. Menurut Alhazaimah et al. (2014), jumlah rapat dewan direksi didefinisikan sebagai jumlah rapat yang dilakukan oleh para dewan direksi dalam setiap tahun.

Semakin banyak jumlah rapat direksi yang dilaksanakan dalam suatu perusahaan, maka semakin berperan dalam peningkatan pengungkapan informasi sukarela perusahaan (Torchia & Calabrò, 2016). Hal ini disebabkan dengan jumlah rapat yang semakin sering dilakukan, menunjukkan adanya implikasi dalam membahas tentang pengembangan strategi perusahaan dan mengawasi manajemen (Domínguez & Gámez, 2014). Sehingga rapat dewan direksi yang dilakukan sangat berkontribusi dalam menghasilkan sebuah informasi terutama informasi-informasi sukarela yang akan disajikan di dalam laporan tahunan (Torchia & Calabrò, 2016).

H₁: Adanya pengaruh signifikan negatif antara jumlah rapat dewan direksi terhadap pengungkapan sukarela.

Variabel Ukuran Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Sukarela

Direksi adalah bagian dari perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab dalam menjalankan dan mengelola perusahaan. Direksi memiliki lima tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang perseroan terbatas. Peraturan tersebut mewajibkan perusahaan publik di Indonesia untuk memiliki minimal dua anggota.

Tingkat atas pengungkapan pada suatu perusahaan merupakan keputusan yang bersifat strategis, yang dibuat dan atas persetujuan dewan direksi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam badan manajemen, dewan direksi dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang harus dilaksanakan oleh para manajer (Chen & Jaggi, 2000). Jumlah dewan direksi yang dianggap efektif dalam suatu perusahaan, setidaknya tidak lebih dari tujuh atau delapan anggota dewan direksi. Akhtaruddin et al. (2009) mengungkapkan bahwa meningkatnya jumlah direksi pada perusahaan, maka semakin tinggi tingkat pengungkapan sukarela yang diungkapkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya jumlah dewan direksi, maka perusahaan akan terisi dengan para dewan direksi yang berpengalaman dan memiliki keahlian yang bervariasi, sehingga kebutuhan dalam keterbukaan informasi akan semakin tinggi. H₂: Adanya pengaruh signifikan positif ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan sukarela.

Variabel Jumlah Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Sukarela

Dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Chakroun (2013) menyatakan bahwa jumlah komisaris independen tidak diperbolehkan untuk memiliki hubungan keluarga dengan manajemen dan tidak memiliki saham yang signifikan dalam perusahaan.

Semakin tinggi jumlah komisaris independen akan meningkatkan jumlah

pengungkapan sukarela yang akan diungkapkan oleh perusahaan (Akhtaruddin & Hossain, 2008). Hal ini disebabkan karena semakin besar jumlah komisaris independen menyebabkan semakin besarnya tekanan yang diberikan kepada pihak manajemen perusahaan.

Suta dan Laksito (2012) berpendapat bahwa semakin tinggi jumlah komisaris independen pada perusahaan maka tingkat pengungkapan sukarela cenderung rendah. Hal ini dikarenakan pengangkatan komisaris independen sebagian hanya didasari oleh penghargaan semata atau adanya hubungan dekat (nepotisme). Pengawasan yang rendah akan pengungkapan informasi disebabkan oleh kemampuan komisaris independen yang lemah dalam memantau kegiatan dan pengambilan keputusan oleh pihak direksi dan manajemen.

H₃: Adanya pengaruh signifikan negatif antara jumlah komisaris independen terhadap pengungkapan sukarela.

Variabel Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Sukarela

Menurut Bokpin dan Isshaq (2009), kepemilikan asing adalah sebuah mekanisme dalam meningkatkan tata kelola perusahaan. Kepemilikan asing merupakan persentase saham yang dimiliki oleh investor asing dari total saham yang beredar (Barros et al., 2013).

Pengungkapan sukarela semakin tinggi dengan meningkatnya kepemilikan asing (Al-Akra et al., 2010). Hal ini dikarenakan investor asing menaruh perhatian lebih pada tata kelola perusahaan melebihi investor domestik (Neifar & Halioui, 2013). Investor asing pada umumnya sangat memonitor manajemen dan membutuhkan standar pengungkapan yang kuat untuk menjamin kualitas atas informasi yang komparatif. Meningkatnya investor asing dalam suatu perusahaan memungkinkan perusahaan menuju pada penyediaan informasi-informasi yang berkualitas termasuk informasi sukarela perusahaan.

H₄: Adanya pengaruh signifikan positif antara kepemilikan asing terhadap pengungkapan sukarela.

Variabel Kepemilikan Pemerintah Terhadap Pengungkapan Sukarela

Kepemilikan pemerintah merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pemerintah atas saham yang beredar (Barros et al., 2013; Alhazaimeh et al., 2014). Semakin tinggi kepemilikan pemerintah, maka semakin tinggi poin pengungkapan sukarela akan semakin meningkat. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang besar akan didorong oleh pihak pemerintah untuk mengungkapkan informasi sebanyak-banyaknya termasuk informasi sukarela. Hal ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat luas (Haji & Ghazali, 2013).

H₅: Adanya pengaruh signifikan positif antara kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan sukarela.

Variabel Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Sukarela

Investor institusional memiliki insentif yang besar dalam memonitor praktik pengungkapan sukarela perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari total saham yang beredar (Ntim et al., 2012).

Semakin tinggi kepemilikan institusi menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pengungkapan sukarela perusahaan (Ntim et al., 2012). Hal ini dikarenakan kepemilikan investor institusional seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Investor institusional disebut sebagai *monitoring agents*. Oleh sebab itu, dalam manajemen perusahaan investor institusional merupakan pemilik saham terbesar yang memiliki insentif yang kuat dalam memantau praktik pengungkapan sukarela perusahaan (Barako, 2007).

H₆: Adanya pengaruh signifikan positif antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela.

Variabel Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan Sukarela

Kepemilikan saham manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh dewan direksi dan komisaris. Menurut Akhtaruddin dan Haron (2010), kepemilikan manajerial sebagai salah satu variabel tata kelola perusahaan yang mencerminkan pengaruh dari pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan pengungkapan perusahaan.

Menurut Hossain et al. (2006); Akhtaruddin dan Rouf (2012) mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin rendah tingkat pengungkapan sukarela. Masalah agensi dapat timbul ketika prinsipal mempekerjakan seseorang manajer yang memiliki tujuan yang berbeda pada perusahaan yang dimiliki oleh prinsipal. Perbedaan kepentingan/tujuan antara prinsipal dan manajer menyebabkan manajer untuk melakukan aktivitas yang dinilai dapat menambah keuntungan diri. Kondisi ini memungkinkan manajer untuk menahan sebagian informasi perusahaan kepada pihak luar (Jensen & Meckling, 1976).

H₇: Adanya pengaruh signifikan negatif antara kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela.

Variabel Jumlah Pemegang Saham Terhadap Pengungkapan Sukarela

Jumlah pemegang saham merupakan penjumlahan dari keseluruhan jumlah pemegang saham pada setiap perusahaan (Sweiti & Attayah, 2013). Jumlah pemegang saham didefinisikan sebagai jumlah pemilik saham dalam satu perusahaan.

Menurut Sweiti dan Attayah (2013), semakin besar jumlah pemegang saham maka semakin besar informasi yang diinginkan oleh setiap pemegang saham tersebut sehingga berefek pada semakin besarnya informasi sukarela yang harus diungkapkan

oleh perusahaan pada laporan tahunan. Jumlah pemegang saham digunakan untuk menyelidiki hubungan antara pengungkapan dalam perusahaan (Omar & Simon, 2011). Dalam penelitian Percy (2000) menjelaskan bahwa jumlah pemegang saham memberikan pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Artinya peningkatan jumlah pemegang saham berbanding seajar dengan peningkatan pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan.

H₈: Adanya pengaruh signifikan positif antara jumlah pemegang saham terhadap pengungkapan sukarela.

Variabel Environmental Sensitivity Terhadap Pengungkapan Sukarela

Risiko ditentukan berdasarkan spesifikasi/kategori perusahaan. Industri manufaktur dan industri yang sensitif dengan lingkungan memiliki kemampuan pengungkapan informasi yang lebih besar (Brammer & Pavelin, 2008). Perusahaan yang bergerak di bidang yang memiliki sensitifitas lingkungan memiliki tekanan sosial yang lebih besar dari pemegang saham. Hal ini dikarenakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur secara langsung bersentuhan dengan lingkungan dan masyarakat. Sehingga perusahaan dituntut untuk menyampaikan pengungkapan baik informasi mengenai kegiatan usaha hingga risiko-risiko yang akan ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan.

Abdullah dan Ismail (2008) berargumen bahwa perusahaan yang bergerak di bidang industri memiliki motivasi yang tinggi dalam menyampaikan informasi pengungkapan sukarela untuk mengurangi biaya keagenan. Selain itu, tipe industri merupakan indikator penting dalam memprediksi rasio pengungkapan perusahaan.

Barac et al. (2014) mengungkapkan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur memiliki tingkat pengungkapan sukarela yang besar daripada sektor perdagangan, perbankan, asuransi, dan

konsultasi bisnis. Manajer pada perusahaan tersebut pada umumnya memiliki insentif untuk mengungkapkan pengungkapan terkait resiko yang dapat mempengaruhi persepsi pemegang saham (stakeholders) terkait dengan dengan reputasi dan kemampuan perusahaan.

H₉: Adanya pengaruh signifikan positif antara *environmental sensitivity* terhadap pengungkapan sukarela.

Variabel *Financial Distress* Terhadap Pengungkapan Sukarela

Perusahaan dikatakan mengalami *financial distress* ketika perusahaan mempunyai *interest coverage ratio* kurang dari satu. *Financial distress* adalah munculnya sinyal awal penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan pada periode tertentu (Setyaningsih, 2008). *Financial distress* digambarkan sebagai suatu kondisi dimana perusahaan gagal membayar kewajiban kepada pihak ketiga atau indikasi ketika sebuah perusahaan mencoba untuk merestrukturisasi hutang karena kesulitan untuk melunasinya.

Nasir dan Abdullah (2004) mengungkapkan bahwa suatu perusahaan dalam keadaan tertekan atau mengalami kesulitan keuangan akan lebih tertutup dalam memberikan informasi pengungkapan sukarela dan mencoba menahan informasi perusahaan kepada public. Semakin besar *financial distress* dengan pengukuran *interest coverage ratio* maka semakin kecil tingkat pengungkapan sukarela.

H₁₀: Adanya pengaruh signifikan positif antara *financial distress* terhadap pengungkapan sukarela.

Variabel Manajemen Laba Terhadap Pengungkapan Sukarela

Schipper (1989) menjelaskan bahwa manajemen laba adalah campur tangan yang disengajakan oleh pihak manajemen pada proses pelaporan keuangan internal perusahaan untuk meraih keuntungan pribadi. Itturriaga dan Hoffmann (2005) mengungkapkan bahwa praktik manajemen

laba dianggap muncul sebagai konsekuensi dari masalah keagenan. Sehingga dapat memicu manajemen menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Perusahaan yang melakukan praktik manajemen laba cenderung mempertimbangkan jumlah informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangannya.

Tingkat pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan yang disajikan dapat membantu pemegang saham dalam memahami isi dan angka yang terdapat dalam. Semakin meningkatnya pengungkapan sukarela maka tingkat transparansi akan semakin meningkat. Sehingga dengan dengan meningkatnya transparansi, praktik manajemen laba akan lebih mudah untuk dideteksi oleh pemegang saham. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar perusahaan dalam melaksanakan praktik manajemen laba, maka semakin sedikit tingkat pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Iatridis dan Alexakis (2013) pada 171 perusahaan yang terdaftar di *Athens Stock Exchange*, diketahui bahwa terdapat hubungan signifikan negatif antara variabel manajemen laba dengan pengungkapan sukarela perusahaan. Penelitian oleh Panjaitan (2015) menemukan bahwa manajemen laba tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Kesimpulan atas hasil penelitian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁₁: Adanya pengaruh signifikan negatif antara manajemen laba terhadap pengungkapan sukarela.

Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Variabel Dependen

Variabel Tingkat Pengelolaan Hutang Terhadap Pengungkapan Sukarela

Tingkat pengelolaan hutang adalah perbandingan antara total kewajiban dengan total aset perusahaan. Rasio tingkat pengelolaan hutang digunakan untuk menilai

seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang (Omar & Simon, 2011).

Menurut Hardiningsih (2008), semakin tinggi tingkat pengelolaan hutang perusahaan, maka akan semakin luas tingkat pengungkapan sukarela yang akan diungkapkan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena semakin luas pengungkapan sukarela dapat membantu perusahaan dalam menghilangkan keraguan para kreditor dan pengungkapan yang dilakukan merupakan kewajiban perusahaan terhadap pemegang saham.

Meningkatnya tingkat pengelolaan hutang suatu perusahaan maka meningkat pula *agency cost* atau transfer kemakmuran dari kreditor jangka panjang kepada pemegang saham dan manajer. Sehingga untuk mengurangi *agency cost* tersebut perusahaan dituntut melakukan pengungkapan yang lebih luas termasuk pengungkapan sukarela guna memenuhi kebutuhan informasi kreditor jangka Panjang.

Suta dan Laksito (2012) menyatakan ketika tingkat pengelolaan hutang yang tinggi, pihak manajemen cenderung bersikap hati-hati dalam melakukan pengungkapan informasi untuk menjaga penilaian positif investor terhadap kemampuan perusahaan dalam mengelola dan pengembalian hutang. Sehingga pernyataan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengelolaan hutang maka semakin rendah tingkat pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan.

H₁₂: Adanya pengaruh signifikan positif antara tingkat pengelolaan hutang terhadap pengungkapan sukarela.

Variabel Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sukarela

Ukuran perusahaan menggambarkan besar/kecil sebuah perusahaan melalui total aktiva yang dimiliki perusahaan (Suta & Laksito, 2012). Total aset merupakan faktor penting dalam pembentukan laba yang dimiliki perusahaan. Hubungan antara ukuran perusahaan dan pengungkapan sukarela dapat dikelaskan melalui teori keagenan, dimana perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar dibanding perusahaan kecil.

Salah satu cara untuk mengurangi biaya agensi adalah dengan melakukan lebih banyak pengungkapan sukarela (Healy & Palepu, 2001).

Amran *et al.* (2009) mengungkapkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin meningkat pula jumlah pemegang saham yang terlibat di dalam perusahaan. Sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan sukarela yang lebih luas.

H₁₃: Adanya pengaruh signifikan positif antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sukarela.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini bersifat kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran terhadap variabel-variabel dengan angka serta analisis data menggunakan prosedur statistika (Santi Yopie, 2019). Ditinjau dari sisi tujuannya, penelitian ini termasuk sebagai penelitian dasar yang bersifat memecah permasalahan secara teoritis, mengembangkan dan mengevaluasi konsep teoritis serta penelitian ini tidak mempunyai pengaruh secara langsung dalam penentuan kebijakan, tindakan atau kinerja tertentu (Indriantoro & Supomo, 2013). Target populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan keluarga non keuangan di Bursa Efek Indonesia. Objek penelitian adalah data keuangan tahunan dengan periode pengamatan 2011-2015.

Variabel Dependen

Pengukuran variabel pengungkapan sukarela menurut Botosan (1997) adalah bertujuan untuk melihat tingkatan pengungkapan atas informasi sukarela dalam laporan tahunan sesuai indikator-indikator pengungkapan sukarela yang dibuat. Indikator yang digunakan pada penelitian ini berpedoman pada penelitian yang dilakukan oleh Hossain dan Hammami (2009). Pengungkapan sukarela pada penelitian ini diukur dengan cara menjumlahkan indikator (skor) pengungkapan sebanyak 44 item yang terlampir pada **Lampiran 1**. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Pengungkapan Sukarela} = \sum_{j=1}^{dj} \frac{dj}{n}$$

Pengungkapan sukarela = total indikator yang dapat diungkapkan

$dj = 1$ jika indikator diungkapkan oleh perusahaan j dalam periode studi, 0 jika tidak.

n = jumlah maksimum indikator yang dapat diungkapkan dari setiap perusahaan j .

Variabel Independen

Jumlah Rapat Dewan Direksi

Jumlah rapat dewan direksi didefinisikan sebagai jumlah rapat yang dilakukan oleh para dewan direksi dalam setiap tahun (Alhazaimah et al., 2014). Jumlah rapat dewan direksi diukur dengan menghitung jumlah pertemuan dewan direksi.

Jumlah Rapat Dewan Direksi = Total pertemuan dewan direksi per tahun

*Jumlah rapat dewan direksi diambil dari laporan tahunan (bagian penjelasan dewan direksi)

Ukuran Dewan Direksi

Leverage adalah rasio yang Ukuran dewan direksi adalah total jumlah dewan direksi pada setiap perusahaan (Akhtaruddin et al., 2009). Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur ukuran dewan direksi:

Ukuran Dewan Direksi = Total dewan direksi dalam perusahaan

*Total dewan direksi diambil dari laporan tahunan (bagian penjelasan dewan direksi).

Jumlah Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Pada Surat edaran BAPEPAM Nomor SE03/PM/2000, Peraturan Pencatatan Efek Nomor 339/BEJ/07-2001, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 20 Ayat 3 tercantum bahwa jumlah komisaris independen

sekurang-kurangnya tiga puluh persen dari keseluruhan jumlah anggota komisaris.

Jumlah Komisaris Independen =

Jumlah komisaris independen / Total jumlah dewan komisaris dan direksi

*Jumlah komisaris independen diambil dari laporan tahunan (bagian penjelasan dewan direksi).

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki investor asing (Barako, 2007). Dengan adanya kepemilikan asing dalam struktur modal perusahaan, maka perusahaan cenderung melakukan pengungkapan sukarela. Sehingga kondisi tersebut mengurangi informasi asimetris yang timbul antara pihak manajemen dan pemegang saham (Dhouibi & Mamoghli, 2013).

Kepemilikan Asing = Jumlah saham yang dimiliki oleh investor asing / Jumlah saham yang beredar

*Kepemilikan asing diambil dari catatan atas laporan keuangan (bagian modal saham).

Kepemilikan Pemerintah

Alhazaimah et al. (2014) mengutarakan bahwa kepemilikan pemerintah adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah. Kepemilikan pemerintah menunjukkan persentase kepemilikan saham yang dimiliki pemerintah dalam suatu perusahaan terhadap keseluruhan saham yang beredar. Skala yang digunakan dalam pengukuran kepemilikan pemerintah adalah skala rasio.

Kepemilikan Pemerintah = Jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah / Jumlah saham yang beredar

*Kepemilikan pemerintah diambil dari catatan atas laporan keuangan (bagian modal saham).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah saham yang dimiliki institusi (Fathi, 2013). Rouf dan Harun (2011) menyatakan bahwa manajemen akan cenderung mengungkapkan informasi secara sukarela

untuk mencapai ekspektasi yang diinginkan oleh pemegang saham mayoritas. Skala pengukuran kepemilikan institusional adalah skala rasio. Dimana proporsi harus lebih dari atau sama dengan 5% dari total saham (Uyar et al., 2013).

Kepemilikan Institusional = Jumlah saham yang dimiliki oleh institusi / Jumlah saham yang beredar

*Kepemilikan institusional diambil dari catatan atas laporan keuangan (bagian modal saham).

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki manajemen perusahaan (Rouf et al., 2014). Skala pengukuran kepemilikan manajerial adalah skala rasio.

Kepemilikan Manajerial = Jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen / Jumlah saham yang beredar

*Kepemilikan manajerial diambil dari catatan atas laporan keuangan (bagian modal saham).

Jumlah Pemegang Saham

Jumlah pemegang saham adalah penjumlahan dari keseluruhan jumlah pemegang saham pada setiap perusahaan. Adapun variabel ini diukur dengan menghitung total pemegang saham setiap perusahaan. Adapun pengukuran untuk variabel jumlah pemegang saham sebagai berikut:

Jumlah Pemegang Saham = Total jumlah pemegang saham dalam perusahaan.

*Jumlah pemegang saham diambil dari catatan atas laporan keuangan (bagian modal saham).

Environmental Sensitivity

Environmental sensitivity merupakan klasifikasi perusahaan ke dalam beberapa kategori jenis industri (Omar & Simon, 2011). Pengukuran variabel ini menggunakan *dummy variable* dengan ketentuan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur diberi nilai 1 dan diberi nilai 0

jika perusahaan tidak bergerak di bidang manufaktur (Barros et al., 2013).

Financial Distress

Salloum et al. (2014) mengungkapkan bahwa sebuah perusahaan dikategorikan sebagai *financial distress* ketika perusahaan sudah tidak berkemampuan untuk menghasilkan laba dan menunjukkan profitabilitas yang negatif. Perusahaan dikategorikan mengalami *financial distress* jika mengalami masalah profitabilitas yang ditandai dengan negatif ROA (*return on asset*) dan tidak mengalami *financial distress* jika memiliki tingkat profitabilitas yang signifikan yang ditandai dengan positif ROA.

1 = bila mengalami *financial distress* (negatif ROA)

0 = bila tidak mengalami *financial distress* (positif ROA)

Manajemen Laba

Menurut Bagheri, Emamgholipur, Bagheri, dan Rekabdarkolaei (2013), manajemen laba dapat dideteksi dengan menggunakan skala rasio dan perhitungan *modified Jones model* melalui cara sebagai berikut:

a. Menentukan Jumlah Akrua (TACC)

TACC dihitung dengan cara mencari selisih antara laba bersih (NI) dan arus kas dari kegiatan operasi (OCF).

TACC = NI – OCF

b. Mencari angka Koefisien.

Uji regresi dengan perangkat lunak statistik harus dilakukan untuk memperkirakan koefisien agar dapat mencari angka *non-discretionary accruals* (NDACC).

$$\frac{TACC}{At-1} = \alpha_1 \left(\frac{1}{At-1} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV - \Delta REC}{At-1} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE}{At-1} \right)$$

Dimana:

At-1 = Jumlah aset pada periode sebelumnya.

ΔREV = Selisih antara penjualan akhir

tahun dan penjualan awal tahun.

$\Delta REC =$ Selisih antara piutang usaha akhir tahun dan piutang usaha awal tahun.

$PPE =$ Jumlah aset tetap kotor pada akhir tahun.

- c. Menghitung Angka NDACC
Setelah mendapatkan angka koefisien dari hasil uji regresi, maka dilakukan perhitungan untuk mencari angka NDACC.

$$\frac{NDACC}{At-1} = \alpha_1 \left(\frac{1}{At-1} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV - \Delta REC}{At-1} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE}{At-1} \right)$$

- d. Mencari Angka *Discretionary Accruals* (DACC)
Angka DACC merupakan angka yang menunjukkan seberapa besar aktivitas manajemen laba yang ada di suatu perusahaan. Cara menghitung angka NDACC dapat dilakukan dengan rumus dibawah ini:

$$DACC = TACC - NDACC$$

Variabel Kontrol

Tingkat Pengelolaan Hutang

Tingkat pengelolaan hutang berkaitan dengan ketergantungan perusahaan dalam penggunaan dana, apakah perusahaan didanai lebih banyak menggunakan hutang atau modal yang berasal dari pemegang saham (Hardiningsih, 2008). Skala pengukuran tingkat pengelolaan hutang adalah skala rasio. Rumus perhitungan tingkat pengelolaan hutang menurut Fathi (2013) adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat pengelolaan hutang} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Aset}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah besar/kecil sebuah perusahaan berdasarkan total aktiva yang dimiliki perusahaan (Suta & Laksito, 2012). Adapun rumus ukuran perusahaan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran perusahaan} = \log \text{Total Assets.}$$

HASIL PENELITIAN

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif pada Variabel Skala Rasio

Variabel	Statistik Deskriptif				
	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Std. Deviasi
Pengungkapan Sukarela	695	0,295	0,864	0,703	0,051
Jumlah Rapat Dewan Direksi	695	1,000	58,000	16,266	12,747
Ukuran Dewan Direksi	695	2,000	13,000	4,800	2,009
Jumlah Komisaris Independen	695	0,000	0,500	0,192	0,077
Kepemilikan Asing	695	0,000	0,970	0,109	0,176
Kepemilikan Pemerintah	695	0,000	0,260	0,003	0,024
Kepemilikan Institusi	695	0,000	0,989	0,680	0,204
Kepemilikan Manajerial	695	0,000	0,739	0,039	0,124
Jumlah Pemegang Saham	695	2,000	24,000	5,038	2,527
<i>Environmental Sensitivity</i>	695	0	1	0,318	0,466
<i>Financial Distress</i>	695	0	1	0,200	0,400
Manajemen Laba	695	-544,287	106,458	-0,893	21,060
Tingkat Pengelolaan Hutang	695	0,0003	7,694	0,563	0,581
Ukuran Perusahaan	695	9,945	13,987	12,197	0,734
<i>Valid N (listwise)</i>	695				

Sumber: Data penelitian diolah (2017)

Hasil menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan keluarga adalah

sebesar 70,3%. Dari nilai rata-rata maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan informasi pada laporan tahunan perusahaan

keluarga sudah baik karena rata-rata telah mencapai lebih dari 50%. Hasil ini juga menunjukkan bahwa perusahaan keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia cenderung mengungkapkan informasi sukarela untuk meningkatkan kepercayaan dan keandalan informasi pada laporan tahunan perusahaan.

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata 68% lebih tinggi dari kepemilikan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemegang saham paling dominan adalah pemegang saham institusional. Sebagai pemegang saham paling dominan dalam perusahaan keluarga, investor institusional memiliki insentif yang besar dalam memonitor praktik pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, pihak manajemen perusahaan dapat secara sukarela dalam mengungkapkan informasi untuk memenuhi harapan pemegang saham.

Kepemilikan asing menunjukkan besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak asing dalam suatu perusahaan. Kepemilikan asing menempati posisi kedua sebagai pemegang saham terbesar dengan nilai rata-rata 10,9%. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur permodalan pada keseluruhan perusahaan keluarga masih didanai oleh investor asing. Dengan adanya pendanaan dari investor asing pada perusahaan keluarga di Indonesia dapat memberikan peluang bagi perusahaan keluarga dalam memperluas pasar.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepemilikan manajerial memegang porsi saham paling rendah dalam struktur permodalan perusahaan keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa saham perusahaan di Indonesia cenderung lebih sedikit dimiliki oleh pihak manajemen, dewan direksi, dan dewan komisaris.

Rata-rata perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia mengadakan rapat 16 kali rapat dewan direksi dalam satu tahun. Nilai rata-rata menunjukkan bahwa perusahaan keluarga di Indonesia telah

menaati Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2015 Pasal 16 Ayat 1 bahwa direksi perusahaan wajib menyelenggarakan rapat direksi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan yakni 12 kali dalam setahun.

Rata-rata jumlah anggota dewan direksi pada perusahaan keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak lima anggota. Jumlah dewan direksi pada perusahaan keluarga di Indonesia paling sedikit berjumlah dua orang. Jumlah terbanyak berjumlah tiga belas orang dewan direksi. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan keluarga telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 2 Ayat 1 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, perusahaan publik di Indonesia diwajibkan untuk memiliki minimal dua anggota direksi.

Rata-rata proporsi jumlah komisaris independen yang dimiliki perusahaan keluarga adalah 19,2%. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata proporsi jumlah komisaris independen perusahaan di Indonesia sangat sedikit. Perusahaan yang memiliki jumlah komisaris independen yang sedikit sehingga lebih dapat mengurangi pengawas kegiatan perusahaan dan menjaga kepentingan *stakeholder*. Hal ini bertolak belakang dengan peraturan yang ditetapkan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 20 Ayat 3 menyatakan bahwa perusahaan publik di Indonesia wajib untuk memiliki proporsi dewan komisaris independen paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Nilai rata-rata pada penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah pada perusahaan keluarga di Indonesia tidak mendominasi dan tidak berperan aktif dalam pasar modal yang kepemilikan sahamnya hampir didominasi oleh institusi.

Jumlah pemegang saham menunjukkan nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 24, nilai rata-rata sebesar 5,04 dan standar deviasi sebesar 2,53. Hal ini

menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan setidaknya memiliki pemegang saham berjumlah 5 orang dalam satu perusahaan. Jumlah pemegang saham terbanyak terdapat

pada PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk dengan total jumlah pemegang saham sebanyak 24 orang.

Tabel 2

Hasil Uji Statistik Deskriptif pada Variabel Environmental Sensitivity

Tipe Industri	Frekuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase Kumulatif
Non Manufaktur	474	68,20	68,20	68,20
Manufaktur	221	31,80	31,80	100,00
Total	695	100,00	100,00	

Sumber: Data penelitian diolah (2017)

Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia lebih banyak bergerak di bidang

non manufaktur daripada di bidang industri manufaktur.

Tabel 3

Hasil Uji Statistik Deskriptif pada Variabel Financial Distress

Tipe Industri	Frekuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase Kumulatif
Non Financial Distress	556	80,00	80,00	80,00
Financial Distress	139	20,00	20,00	100,00
Total	695	100,00	100,00	

Sumber: Data penelitian diolah (2017)

Disimpulkan bahwa perusahaan keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara rata-rata tidak mengalami kondisi *financial distress* dengan laba bernilai positif. Hasil penelitian ini juga menunjukkan terdapat perusahaan keluarga yang mengalami kondisi *financial distress* sebesar 20%. Hal ini dapat disebabkan oleh tingkat persaingan yang tinggi antar perusahaan keluarga di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan keluarga di Indonesia memiliki kecenderungan melakukan praktek manajemen laba dengan menurunkan laba sebesar 89,3% dari jumlah aset tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan keluarga di Indonesia yang tidak menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini memberikan signal bagi pemegang saham untuk lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan dalam melakukan investasi.

Tingkat pengelolaan hutang memiliki nilai minimum 0,0003, nilai maksimum sebesar 7,694 dan nilai standar deviasi

sebesar 0,58. Berdasarkan hasil deskriptif statistik menunjukkan nilai penyimpangan pada data tingkat pengelolaan hutang relatif tinggi yakni 0,58. Hasil uji ini menunjukkan bahwa rata-rata aset perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan sebagian besar diperoleh dari hutang yakni sebesar 56,3% dari jumlah aset. PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk merupakan perusahaan di Bursa Efek Indonesia dengan tingkat pengelolaan hutang terendah yakni sebesar 0,00032 dan PT. Steady Safe Tbk dengan tingkat pengelolaan hutang tertinggi yakni 7,694.

Nilai ukuran perusahaan yang ditunjukkan dalam tabel 4.2 memiliki nilai rata-rata sebesar 12,197 dengan standar deviasi sebesar 0,734. Standar deviasi ukuran perusahaan sebesar 0,734 lebih besar dari 1,76. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan masih tergolong tinggi yakni dengan rata-rata ukuran perusahaan yakni sebesar Rp 5.278.476.957.742. Nilai rata-rata ukuran perusahaan keluarga dalam penelitian ini berada di atas Rp 100.000.000.000

berdasarkan peraturan BAPEPAM Nomor 11/PM/1997.

Tabel 4
Hasil Uji t

Variabel	Koefisien Korelasi	Prob.	Kesimpulan	Hipotesis
Jumlah Rapat Dewan Direksi	-5,22E-05	0,7140	Tidak Signifikan	Tidak Terbukti
Ukuran Dewan Direksi	0,001893	0,0283	Signifikan Positif	Terbukti
Jumlah Komisaris Independen	-0,006338	0,7521	Tidak Signifikan	Tidak Terbukti
Kepemilikan Asing	0,017144	0,0915	Tidak Signifikan	Tidak Terbukti
Kepemilikan Pemerintah	0,014193	0,8600	Tidak Signifikan	Tidak Terbukti
Kepemilikan Institusional	0,023746	0,0270	Signifikan Negatif	Tidak Terbukti
Kepemilikan Manajerial	0,006757	0,6894	Tidak Signifikan	Tidak Terbukti
Jumlah Pemegang Saham	0,001642	0,0183	Signifikan Positif	Terbukti
<i>Environmental Sensitivity</i>	0,002843	0,0000	Signifikan Positif	Terbukti
<i>Financial Distress</i>	-0,009241	0,0112	Signifikan Negatif	Terbukti
Manajemen Laba	-7,44E-05	0,2202	Tidak Signifikan	Tidak Terbukti
Tingkat Pengelolaan Hutang	-0,002265	0,4110	Tidak Signifikan	Tidak Terbukti
Ukuran Perusahaan	0,013452	0,0000	Signifikan Positif	Terbukti

Sumber: Data penelitian diolah (2017)

Jumlah rapat dewan direksi memiliki hubungan negatif yang tidak signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Hal ini dikarenakan bahwa rapat dewan direksi merupakan suatu proses dalam pembuatan keputusan. Ketika terdapat dewan direksi yang tidak hadir atau dalam kondisi tidak siap dalam menghadiri rapat maka proses penyampaian dan pembuatan keputusan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini menyebabkan pada tingkat pengawasan menjadi kurang efektif dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan sebagai simbol pertanggungjawaban kepada dewan direksi (Gantjowati & Nugraheni, 2014). Hasil yang tidak signifikan juga dapat dikarenakan kebijakan pengadaan rapat di setiap perusahaan yang sangat bervariasi.

Pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan sukarela melalui pengujian ini menunjukkan bahwa komposisi ukuran dewan direksi yang banyak memberikan gambaran bahwa perusahaan diisi oleh para dewan direksi yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas perusahaan dan menyediakan informasi yang cukup kepada pemegang saham (Barros et al., 2013). Ukuran dewan direksi yang besar juga menunjukkan bahwa perusahaan diisi oleh direksi yang berpengalaman dalam

menelola sumber daya modal perusahaan dan memiliki keahlian yang bervariasi sehingga kebutuhan dalam keterbukaan informasi akan semakin tinggi (Akhtaruddin et al., 2009).

Variabel jumlah komisaris independen memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Hal ini disebabkan karena perusahaan keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki jumlah komisaris independen yang sedikit sehingga mengurangi tingkat pengawasan terhadap kegiatan perusahaan dan keahlian atau kompetensi serat integritas dari komisaris independen yang masih lemah atau kurang maksimal sehingga menghambat kinerjanya (Al-Akra et al., 2010). Alasan lain yang mendasari ketidaksignifikanan jumlah komisaris independen terhadap pengungkapan sukarela adalah karena kedudukan direksi yang terlalu kuat, sehingga kehadiran komisaris independen hanya dianggap sebagai sebuah struktur organisasi yang formal saja (Suta & Laksito, 2012).

Hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela perusahaan tidak dapat dibuktikan dengan

hasil penelitian ini. Hal ini didasari bahwa pihak investor asing melakukan penanaman modal lebih cenderung mementingkan tingkat pengembalian yang akan mereka terima, kondisi infrastruktur, dan kondisi politik. Ketidaksignifikanan antara variabel kepemilikan asing terhadap pengungkapan sukarela juga dapat disebabkan oleh kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi kepemilikan modal asing pada perusahaan Indonesia melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 27 Tahun 2013 yakni 49% kepemilikan modal asing untuk izin usaha operasi produksi dan 75% kepemilikan modal asing untuk izin usaha eksplorasi. Peraturan mengenai batasan maksimal kepemilikan modal asing ini dapat menghambat kepemilikan asing dalam mengontrol keputusan yang dilakukan oleh manajer perusahaan termasuk pengungkapan informasi sukarela (Binh, 2014).

Kepemilikan pemerintah tidak memiliki hubungan signifikan terhadap pengungkapan sukarela pada perusahaan keluarga. Hal ini dikarenakan perusahaan yang dikelola keluarga pada umumnya memiliki kepemilikan pemerintah yang tidak signifikan atau pemegang saham minoritas. Perusahaan dengan lebih dari 50% kepemilikan pemerintah adalah perusahaan milik negara yang pada dasarnya negara sebagai pemilik memiliki tujuan tersendiri yang lebih fokus pada lapangan pekerjaan yang besar, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan yang berbanding terbalik dengan tujuan yang dimiliki oleh pemegang saham individual (Binh, 2014). Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah memungkinkan perusahaan tidak perlu memberikan pengungkapan yang luas dikarenakan terdapat pemantauan terpisah yang dilakukan pemerintah sehingga mengurangi asimetri informasi dan perilaku oportunistik perusahaan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa investor institusional mungkin memiliki akses informasi secara langsung dari pihak perusahaan dan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi tidak mendorong

tingkat pengungkapan sukarela. Umumnya, perusahaan lebih memilih untuk memberikan informasi secara langsung kepada pemegang saham institusional daripada melakukan pengungkapan secara publik dalam laporan tahunan. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional dianggap sebagai pengganti pengungkapan sukarela karena berkaitan erat dengan pengungkapan wajib (Chakroun & Matoussi, 2012).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 7 yakni kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap luasnya pengungkapan sukarela pada perusahaan keluarga tidak dapat diterima. Hasil ini dikarenakan kepemilikan pihak manajemen yang cenderung kecil sehingga pihak manajemen tidak memiliki kendali dalam menentukan informasi apa saja yang akan disajikan (Poluan & Nugroho, 2015). Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh dalam membuat keputusan pada perusahaan keluarga dikarenakan manajerial perusahaan dikendalikan oleh pihak keluarga perusahaan.

Jumlah pemegang saham memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sukarela perusahaan dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pemegang saham dapat dijadikan patokan dalam melihat tingkat pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan, karena perusahaan dengan jumlah pemegang saham yang banyak memiliki tingkat pengungkapan sukarela yang banyak dibandingkan dengan perusahaan dengan jumlah pemegang saham yang sedikit. Hal ini menunjukkan H_8 dalam penelitian ini diterima. Menurut Sweiti dan Attayah (2013), semakin besar jumlah pemegang saham maka semakin besar informasi yang diinginkan oleh setiap pemegang saham tersebut sehingga berefek pada semakin besarnya informasi sukarela yang harus diungkapkan oleh perusahaan pada laporan tahunan.

Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur memiliki kemungkinan melakukan pengungkapan sukarela yang lebih banyak dalam laporan tahunan perusahaan dibandingkan dengan sektor

lainnya. Hal ini dikarenakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur secara langsung bersentuhan dengan lingkungan dan masyarakat. Perusahaan dituntut untuk menyampaikan pengungkapan baik informasi mengenai kegiatan usaha hingga risiko-risiko yang akan ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan.

Financial distress berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* akan melakukan pengungkapan sukarela lebih sedikit. Hal ini dikarenakan perusahaan berupaya untuk tidak memperlihatkan kondisi tersebut kepada publik sehingga perusahaan melakukan pengurangan informasi sukarela pada laporan tahunan (Poluan & Nugroho, 2015).

Tinggi rendahnya perusahaan melakukan manajemen laba tidak akan mempengaruhi besar kecilnya pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan keluarga di Indonesia. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa jika manajer melakukan manajemen laba dengan tujuan mengkomunikasikan informasi dan meningkatkan nilai perusahaan maka manajer akan memberikan informasi yang lebih banyak kepada pihak luar perusahaan melalui pengungkapan sukarela (Panjaitan, 2015).

Tingkat pengelolaan hutang memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan sukarela pada penelitian ini tidak terbukti. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hardiningsih, (2008). Penelitian yang dilakukan Hardiningsih (2008), ditemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara tingkat pengelolaan hutang terhadap pengungkapan sukarela. Hal ini dikarenakan perusahaan cenderung mengungkapkan mengapa kondisi hutang mereka berada pada angka tertentu kepada publik sehingga diharapkan investor cukup jelas mengetahui kondisi hutang perusahaan. Ketika tingkat pengelolaan hutang yang tinggi, pihak perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan pengungkapan informasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran akan penilaian dari

pihak investor terhadap kemampuan perusahaan dalam mengelola dan pengembalian hutang (Suta & Laksito, 2012).

Terdapat pengaruh signifikan dengan arah hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan sukarela perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula biaya keagenan yang ditimbulkan (Suta & Laksito, 2012) dan semakin meningkat pula jumlah *stakeholder* yang terdapat pada perusahaan tersebut. Semakin besarnya perusahaan maka kegiatan usaha yang dimiliki akan cenderung lebih kompleks, sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, perusahaan besar dituntut untuk menyajikan informasi lebih luas sebagai bentuk pertanggungjawaban dibandingkan dengan perusahaan kecil (Suta & Laksito, 2012).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan, *environmental sensitivity*, *financial distress*, dan manajemen laba terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah rapat dewan direksi, ukuran dewan direksi, jumlah komisaris independen, kepemilikan asing, kepemilikan institusi, kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, *environmental sensitivity*, *financial distress*, dan manajemen laba.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, jumlah pemegang saham, *environmental sensitivity* memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan keluarga di Indonesia (H_2 , H_8 , H_9 terbukti), variabel kepemilikan institusional dan *financial distress* yang berpengaruh signifikan dan bernilai negatif terhadap pengungkapan sukarela perusahaan keluarga di Indonesia (H_6 tidak terbukti dan H_{10} terbukti).

Variabel kontrol pada penelitian ini yaitu variabel tingkat pengelolaan hutang tidak berpengaruh signifikan (H_{12} tidak

terbukti). Variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela (H_{13} terbukti).

Penelitian ini tidak menemukan bukti empiris pengaruh yang signifikan antara variabel ukuran dewan direksi, jumlah komisaris independen, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, dan manajemen laba terhadap pengungkapan sukarela perusahaan keluarga.

Tingkat pengungkapan sukarela pada perusahaan keluarga di Indonesia masih tergolong tinggi. Dari 44 indikator pengungkapan sukarela, rata-rata pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan keluarga di Indonesia adalah sebanyak 31 indikator atau sebesar 70,30% dari jumlah keseluruhan. Dari nilai rata-rata maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan informasi pada laporan tahunan perusahaan keluarga sudah baik karena rata-rata telah mencapai lebih dari 50%. Hasil ini juga menunjukkan bahwa perusahaan keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia cenderung mengungkapkan informasi sukarela untuk meningkatkan kepercayaan dan keandalan informasi pada laporan tahunan perusahaan.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, yakni

1. Dalam penelitian ini, indeks pengungkapan mengacu pada indikator-indikator pengungkapan yang dipakai oleh Hossain dan Hammami (2009) dalam menentukan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Indeks pengungkapan tersebut ditentukan atas dasar interpretasi peneliti setelah membaca isi laporan tahunan perusahaan dan penelitian-penelitian tentang pengungkapan sukarela terdahulu. Sehingga mengakibatkan pemberian skor oleh peneliti yang berbeda akan menghasilkan skor yang berbeda (Domínguez & Gámez, 2014)
2. Kesalahan penafsiran yang dapat terjadi dalam pemberian skor.

Misalnya indikator berupa *return on equity*, *net interest margin*, *debt-to-equity ratio*. Indikator-indikator kinerja keuangan ini memiliki kemungkinan tidak disajikan secara langsung dalam laporan tahunan. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan peneliti memberikan skor 0 pada indikator tersebut.

Rekomendasi penulis kepada peneliti selanjutnya berupa:

1. Kesalahan penafsiran yang dapat terjadi dalam pemberian skor. Misalnya indikator berupa *return on equity*, *net interest margin*, *debt-to-equity ratio*. Indikator-indikator kinerja keuangan ini memiliki kemungkinan tidak disajikan secara langsung dalam laporan tahunan. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan peneliti memberikan skor 0 pada indikator tersebut.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan sumber pengamatan data melalui berbagai sumber seperti situs web, koran, media elektronik lainnya (triangulasi sumber data). Hal ini dikarenakan publikasi melalui media elektronik, web, dan koran yang dilakukan perusahaan juga mencerminkan pengungkapan informasi perusahaan kepada masyarakat.
3. Menambahkan variabel-variabel lain yang belum ditambahkan pada penelitian ini namun sudah dijelaskan di model penelitian terdahulu, seperti rasio keuangan perusahaan, serta beberapa variabel tata kelola perusahaan yang belum ditambahkan seperti variabel karakteristik komite audit yakni komite audit, jumlah rapat

komite audit, kualitas audit, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ağca, A., & Önder, Ş. (2007). Voluntary disclosure in Turkey: A study on firms listed in Istanbul stock exchange (ISE). *Problems and Perspectives in Management*, 5(3), 241–251.
- Akhtaruddin, M., & Abdur Rouf, M. (2012). Corporate governance, cultural factors and voluntary disclosure: Evidence from selected companies in Bangladesh. *Corporate Board: Role, Duties and Composition*, 8(1), 48–61. <https://doi.org/10.22495/cbv8i1art4>
- Akhtaruddin, M., & Haron, H. (2010). Board ownership, audit committees' effectiveness, and corporate voluntary disclosures. *Asian Review of Accounting*, 18(3), 245–259. <https://doi.org/10.1108/13217341011089649>
- Akhtaruddin, M., & Hossain, M. (2008). Investment Opportunity Set, Ownership Control and Voluntary Disclosures in Malaysia. *Joaag*, 3(2), 25–39.
- Akhtaruddin, Mohamed, Hossain, M. A., Hossain, M., & Yao, L. (2009). Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms. *Jamar*, 7(1), 1–20.
- Al-Akra, M., Eddie, I. A., & Ali, M. J. (2010). The association between privatisation and voluntary disclosure: Evidence from Jordan. *Accounting and Business Research*, 40(1), 55–74. <https://doi.org/10.1080/00014788.2010.9663384>
- Alhazaimah, A., Palaniappan, R., & Almsafir, M. (2014). The Impact of Corporate Governance and Ownership Structure on Voluntary Disclosure in Annual Reports among Listed Jordanian Companies. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 129, 341–348. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.686>
- Attig, N., Fong, W. M., Gadhoom, Y., & Lang, L. H. P. (2011). Effects of Large Shareholding on Information Asymmetry and Stock Liquidity. *SSRN Electronic Journal*, August. <https://doi.org/10.2139/ssrn.572761>
- Barac, Z. A., Granic, M., & Vuko, T. (2014). The Determinants of Voluntary Disclosure in Croatia. *International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering*, 8(4), 1048–1054.
- Barako, D. G. (2007). Determinants of voluntary disclosures in Kenyan companies annual reports. *African Journal of Business Management*, 1(5), 113–128.
- Barros, C. P., Boubaker, S., & Hamrouni, A. (2013). Corporate governance and voluntary disclosure in France. *Journal of Applied Business Research*, 29(2), 561–578. <https://doi.org/10.19030/jabr.v29i2.7657>
- Binh, T. Q. (2014). A Case Study of Voluntary Disclosure By Vietnamese Listed Companies Author Detail: Ta Quang Binh, Ph.D.- Assistant Prof., Department of Accounting and Auditing, Vietnam University of Commerce, Hanoi, Vietnam. *International Journal of Management Sciences and Business Research*, 3(4), 36–53.
- Bokpin, G. A., & Isshaq, Z. (2009). Corporate governance, disclosure and foreign share ownership on the Ghana Stock Exchange. *Managerial Auditing Journal*, 24(7), 688–703. <https://doi.org/10.1108/02686900910975387>
- Botosan, C. A. (1997). *Disclosure Level and Cost of Equity.pdf*.
- Brammer, S., & Pavelin, S. (2008). Factors influencing the quality of corporate environmental disclosure. *Business Strategy and the Environment*, 17(2), 120–136. <https://doi.org/10.1002/bse.506>
- Caliskan, D. (2012). The Effect of Ownership Structure on Dividend Policy. *SSRN Electronic Journal*, 769–796.

- <https://doi.org/10.2139/ssrn.2140019>
Chakroun, Raïda. (2013). Family Control , Board of Directors ' I ndependence and Extent of Voluntary Disclosure in the Annual Reports: Case of Tunisian Companies. *Journal of Business Studies Quarterly*, 5(1), 22–43.
- Chakroun, Raïda, & Matoussi, hamadi. (2012). Determinants of the Extent of Voluntary Disclosure in the Annual Reports of the Tunisian Firms. *Journal of Accounting and Management Information Systems*, 11(3), 335–370.
- Chariri, A., & Ghozali, I. (2013). *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Chen, C. J. P., & Jaggi, B. (2000). Association between independent non-executive directors, family control and financial disclosures in Hong Kong. *Journal of Accounting and Public Policy*, 19(4–5), 285–310. [https://doi.org/10.1016/S0278-4254\(00\)00015-6](https://doi.org/10.1016/S0278-4254(00)00015-6)
- Claessens, S., Djankov, S., & Lang, L. H. P. (2000). The separation of ownership and control in East Asian Corporations. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 58, Issues 1–2). [https://doi.org/10.1016/s0304-405x\(00\)00067-2](https://doi.org/10.1016/s0304-405x(00)00067-2)
- Darmadi, S., & Sodikin, A. (2013). Information disclosure by family-controlled firms: The role of board independence and institutional ownership. *Asian Review of Accounting*, 21(3), 223–240. <https://doi.org/10.1108/ARA-01-2013-0009>
- Fathi, J. (2013). Corporate governance and the level of financial disclosure by Tunisian firm. *Journal of Business Studies Quarterly*, 4(3), 95–111.
- Gantjowati, E., & Nugraheni, R. L. (2014). The Impact of Financial Distress Status and Corporate Governance Structures on the Level of Voluntary Disclosure Within Annual Reports of Firms (Case Study of Non-financial Firms in Indonesia Over the Period of 2009-2011. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 10(4), 1–121.
- Ghasempour, A., & Yusof, M. A. B. M. (2014). The effect of fundamental determinants on voluntary disclosure of financial and nonfinancial information: The case of internet reporting on the Tehran stock exchange. *International Journal of Digital Accounting Research*, 14(March), 37–56. https://doi.org/10.4192/1577-8517-v14_2
- Haji, A. A., & Ghazali, N. A. M. (2013). The quality and determinants of voluntary disclosures in annual reports of Shari'ah compliant companies in Malaysia. *Humanomics*, 29(1), 24–42. <https://doi.org/10.1108/08288661311299303>
- Hardiningsih, P. (2008). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLUNTARY DISCLOSURE LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 15(1), 67–79.
- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. *Journal of Accounting and Economics*, 31(1–3), 405–440. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(01\)00018-0](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00018-0)
- Hossain, Mahmud, Marks, B. R., & Mitra, S. (2006). Stock Ownership Structure and Voluntary Disclosure of Quarterly Foreign Sales Data of U.S. Multinational Corporations. *Multinational Business Review*, 14(3), 71–94. <https://doi.org/10.1108/1525383X20060014>
- Hossain, Mohammed, & Hammami, H. (2009). Voluntary disclosure in the annual reports of an emerging country: The case of Qatar. *Advances in Accounting*, 25(2), 255–265. <https://doi.org/10.1016/j.adiaac.2009.08.002>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of firm: Managerial behavior,

- agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Lambert, R., Leuz, C., & Verrecchia, R. E. (2007). Accounting information, disclosure, and the cost of capital. *Journal of Accounting Research*, 45(2), 385–420. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2007.00238.x>
- Ling, H. P., & Lee, G. C. (2012). Enhancing Corporate Governance Structure for Greater Voluntary Disclosure: Malaysia Evidence. *Eadn Working Paper*, 49(49), 1–24.
- McNichols, M. F. (2000). Research design issues in earnings management studies. In *Journal of Accounting and Public Policy* (Vol. 19, Issues 4–5). [https://doi.org/10.1016/S0278-4254\(00\)00018-1](https://doi.org/10.1016/S0278-4254(00)00018-1)
- Nasir, N. M., & Abdullah, S.-N. (2004). Voluntary disclosure and corporate governance among financially distressed firms in Malaysia. *Financial Reporting, Regulation and Governance*, 3(1), 1–39.
- Neifar, S., & Halioui, K. (2013). Determinants of Corporate Governance Disclosure: The Case of Tunisian Firms Listed on the Tunis Stock Exchange. *International Journal of Finance and Accounting*, 2(3), 174–183. <https://doi.org/10.5923/j.ijfa.20130203.05>
- Ntim, C. G., Opong, K. K., Danbolt, J., & Thomas, D. A. (2012). Voluntary corporate governance disclosures by post-Apartheid South African corporations. *Journal of Applied Accounting Research*, 13(2), 122–144. <https://doi.org/10.1108/09675421211254830>
- Omar, B., & Simon, J. (2011). Corporate aggregate disclosure practices in Jordan. *Advances in Accounting*, 27(1), 166–186. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2011.05.002>
- Othman, R., Ishak, I. F., Arif, S. M. M., & Aris, N. A. (2014). Influence of Audit Committee Characteristics on Voluntary Ethics Disclosure. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 145, 330–342. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.042>
- Panjaitan, Y. R. Y. (2015). Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 04(02), 1689–1699.
- Percy, M. (2000). Financial reporting discretion and voluntary disclosure: Corporate research and development expenditure in Australia. *Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics*, 7(1), 1–31. <https://doi.org/10.1080/16081625.2000.10510572>
- Poluan, G., & Nugroho, P. I. (2015). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Kondisi Financial Distress Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 39–56.
- Rodríguez Domínguez, L., & Noguera Gámez, L. C. (2014). Corporate reporting on risks: Evidence from Spanish companies. *Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review*, 17(2), 116–129. <https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2013.10.002>
- Santi Yopie, dan. (2019). *Management Capability To Produce Quality Earning*. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i1.45>
- Setyaningsih, H. (2008). Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan Terhadap Konservatisme. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 9(1), 91–107.
- Singapurwoko, A. (2013). Indonesian

- Family Business vs. Non-Family Business Enterprises: Which has Better Performance? *International Journal of Business and Commerce*, 2(5), 35–43. www.ijbcnet.com
- Suta, A. Y., & Laksito, H. (2012). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN LUAS INFORMASI SUKARELA LAPORAN TAHUNAN. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 1(1), 1–15.
- Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi—Perekayasaan Pelaporan Keuangan* (3rd ed.). BPFPE.
- Sweiti, I. M., & Attayah, O. F. (2013). Critical Factors Influencing Voluntary Disclosure: The Palestine Exchange “PEX.” *Global Journal of Management and Business Research Finance*, 13(6), 9–14.
- Torchia, M., & Calabrò, A. (2016). Board of directors and financial transparency and disclosure. Evidence from Italy. *Corporate Governance (Bingley)*, 16(3), 593–608. <https://doi.org/10.1108/CG-01-2016-0019>
- Uyar, A., Kilic, M., & Bayyurt, N. (2013). Association between firm characteristics and corporate voluntary disclosure: Evidence from Turkish listed companies. *Intangible Capital*, 9(4), 1080–1112. <https://doi.org/10.3926/ic.439>
- Vali, K., Soheila, K., & Abbas Aflatooni. (2010). The effect of corporate governance structure on the extent of voluntary disclosure in Iran. *Business Intelligence Journal*, 3(2), 151–164.
- Yuniasih, C., Dharma, S., & Nugroho, P. I. (2013). Proceedings of the International Conference on Managing the Asian Century. *Proceedings of the International Conference on Managing the Asian Century*, 217–224. <https://doi.org/10.1007/978-981-4560-61-0>